

JURNAL

**PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI
BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 515/KPTS/HK.060/9/2004 DAN NOMOR 2/SKB/BPN/2004
UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN
SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

PRISKA LARAS DAMASWARI ZEBUA

NPM : 110510604

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI
BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 515/KPTS/HK.060/9/2004 DAN NOMOR 2/SKB/BPN/2004
UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN
SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

PRISKA LARAS DAMASWARI ZEBUA

**NPM : 110510604
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dr. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum.

Tanggal

: 6 Juli '15

Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II

Maria Hutapea, SH.,M.Hum.

Tanggal

: 6 Juli 15

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,M.Hum.

**PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI
BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 515/KPTS/HK.060/9/2004 DAN NOMOR 2/SKB/BPN/2004
UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN
SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Priska Laras Damaswari Zebua, V. Hari Supriyanto, Maria Hutapea

Progam Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The title of this research is Program of Land Certification for Farmers based on the Decree of The Minister of Agriculture and The Head of The National Land Body Number 515/KPTS/HK.060/9/2004 and Number 2/SKB/BPN/2004 on Applying Legal Certainty in Sleman Regency. The problems in this research are: how the implementation of The Program of Land Certification for Farmers in 2013 in Sleman Regency and have farmers who followed The Program of Land Certification for Farmers in 2013 have obtained legal certainty. Type of the research is empirical legal research which is a study that focuses on the behavior of the legal community. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data . The Program of Land Certification for Farmers in 2013 in Sleman Regency in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and PMNA / KBPN Number 3 of 1997 on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 at this stage of socialization, the gathering of administrative requirements, measuring and publishing certificate. The implementation of The Program of Land Certification for Farmers in 2013 in

Sleman Regency has given legal certainty to all respondents because all respondents have already obtained certificates of land right ownership.

Keywords: Program of Land Certification for Farmers, Land Ownership Right, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 yang merupakan dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.¹ Salah satu tujuan pokok dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.²

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah kepastian hukum yang meliputi kepastian subyek yaitu pemegang hak atas, kepastian obyek yaitu mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, serta kepastian mengenai status hak atas tanah.

¹ Kertasapoetra, dkk., 1984, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

² Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 29.

Pada tanggal 24 Maret 1961 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah . Selama 36 tahun berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 belum memberikan hasil yang diharapkan dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional sehingga pemerintah beranggapan perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Hal tersebut mendasari dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berlaku mulai tanggal 8 Oktober 1997.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Maksud dari Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis serta dikeluarkannya sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat bagi pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas satuan rumah susun.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pernah dijuluki sebagai “lumbung padi” Daerah

Istimewa Yogyakarta. Beberapa tahun belakangan ini sering terjadi alih fungsi tanah pertanian yaitu mengubah tanah pertanian menjadi tanah non pertanian karena pemilik tanah pertanian menganggap tanah non pertanian lebih menguntungkan sehingga tanah pertanian semakin berkurang dan apabila terus berkurang maka produksi pangan juga akan berkurang. Tanah pertanian umumnya dimiliki oleh petani dan banyak tanah pertanian tersebut belum bersertipikat. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian dan Koperasi bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 Dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian. Program sertipikasi tanah petani tersebut merupakan program lintas sektor dan disubsidi langsung oleh Pemerintah sehingga diharapkan pemilik tanah pertanian dapat mendaftarkan hak milik atas tanahnya yang belum didaftar, dengan mudah dan dengan biaya yang ringan. Program Sertipikasi Tanah Petani diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah pertanian dan memberdayakan petani karena petani dapat menggunakan sertipikat sebagai modal untuk meningkatkan produksi dan kesuburan dari tanah pertanian yang mereka miliki sehingga produksi pangan di Indonesia meningkat.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Sertipikasi Tanah Petani berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman?

2. Apakah petani yang mengikuti Program Sertifikasi Tanah Petani pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian telah memperoleh kepastian hukum?

PEMBAHASAN

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Hak milik atas tanah wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUPA. Kegiatan Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan pendaftaran meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Petani dilakukan melalui kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali.

1. Pelaksanaan Program Sertipikasi Tanah Petani untuk mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Proses pelaksanaan dan syarat dalam Program Sertipikasi Tanah Petani tahun 2013 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

a. Pra Sertipikasi Tanah Petani

Pra Sertipikasi Tanah Pertanian merupakan kegiatan strategis dan perlu dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan subyek dan obyek Pra Sertipikasi Tanah Pertanian yang dilaksanakan sebelum proses pensertipikatan. Dinas Pertanian Kabupaten Sleman menentukan beberapa kriteria peserta Program Sertipikasi Tanah Petani yaitu kriteria subyek Program Sertipikasi Tanah Petani dan kriteria obyek Program Sertipikasi Tanah Petani untuk menentukan calon peserta dan calon lokasi (CPCL) Program Sertipikasi Tanah Petani.

Kriteria subyek bagi petani peserta Program Sertipikasi Tanah Petani, yaitu:

- 1) Petani perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam wadah kelompok tani binaan.
- 2) Petani pemohon harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah dan sebagai anggota/pengurus kelompok tani binaan.
- 3) Memiliki tanah pertanian yang belum bersertipikat.
- 4) Petani calon peserta terpilih yang telah diidentifikasi dan diseleksi oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten Sleman setempat bersama

Instansi terkait serta telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

- 5) Bersedia melengkapi persyaratan administrasi kegiatan sertipikasi lahan pertanian.
- 6) Memiliki bukti kepemilikan tanah.
- 7) Memberikan keterangan tertulis diatas materai tentang riwayat perolehan tanah.
- 8) Bersedia menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan pada waktu pengukuran berlangsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- 9) Petani bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukan lainnya.

Kriteria obyek program Seripikasi Tanah Petani yang menjadi persyaratan,yaitu:

- 1) Tanah merupakan lahan pertanian (mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).
- 2) Tanah tidak dalam sengketa.
- 3) Bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak di atas Hak Pengelolaan atau Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).
- 4) Tanah berada dalam 1 (satu) kawasan atau hamparan yang berdekatan.
- 5) Luas tanah petani per persil/bidang maksimal 2 ha (dua hektar).

- 6) Bukan tanah warisan yang belum dibagi.
- 7) Untuk tanah milik adat disertai Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat.
- 8) Lokasi tanah berada dalam satu desa dan atau desa yang lain yang bertetangga dalam satu kecamatan dengan lokasi domisili pemilik/pemilik penggarap tanah tersebut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 9) Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan).
- 10) Tanah tersebut tidak merupakan tanah eks lahan transmigrasi.

b. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan di masing-masing dusun. Sosialisasi dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dan dihadiri oleh seluruh peserta Program Sertipikasi Tanah Petani. Dalam sosialisasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman memberikan penyuluhan tentang program Sertipikasi Tanah Petani, persyaratan yang dibutuhkan dan biaya yang disubsidi maupun yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Biaya yang disubsidi oleh pemerintah adalah biaya Pendaftaran Tanahnya. Untuk biaya biaya patok, materai, foto kopi kelengkapan syarat administrasi, administrasi desa dan kecamatan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbidang ditanggung oleh peserta Program Sertipikasi Tanah Petani.

c. Pengumpulan syarat administrasi

Syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh peserta Program Sertifikasi Tanah Petani adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 3) Fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 4) Bukti kepemilikan tanah (letter c);
- 5) Surat pernyataan bermaterai bahwa petani peserta program Sertifikasi Tanah Petani tidak akan mengalihfungsikan lahan pertaniannya;
- 6) Pembayaran administrasi desa bagi peserta pemilik tanah konversi atau pembayaran administrasi ke kecamatan bagi peserta pemilik tanah yang berasal dari warisan;
- 7) Surat kematian apabila tanah yang didaftarkan merupakan tanah warisan;
- 8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari para ahli waris bila tanah yang didaftarkan merupakan tanah warisan;
- 9) Keterangan warisan bila tanah yang didaftarkan merupakan tanah warisan.

d. Pengukuran

Pengukuran bidang tanah peserta program Sertifikasi Tanah Petani di dilakukan oleh satgas pengukuran dan satgas yuridis Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman bersama-sama dengan pemilik tanah, perwakilan dari kelompok tani.

Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa :

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.

e. Pengumuman

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa:

“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”

Pengumuman pendaftaran tanah program Sertifikasi Tanah Petani dilakukan selama 60 hari setelah pengukuran selesai dilaksanakan.

Pengumuman pendaftaran program Sertifikasi Tanah Petani diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan di masing-masing Desa. Maka pengumuman Program Sertifikasi Tanah Petani tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 63

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

f. Penerbitan dan penyerahan sertifikat

Sertipikat diserahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Penyerahan sertipikat dilaksanakan tidak serentak dimasing-masing pedukuhan namun secara bertahap. Jangka waktu dilaksanakannya Program Sertipikasi Tanah Petani dari awal hingga diserahkannya sertipikat paling lama adalah 1 tahun.

g. Pasca Sertipikasi Tanah Petani

Pasca Sertipikasi Tanah Petani adalah keadaan atau dampak setelah tanah pertanian milik petani yang telah disertipikatkan, atau telah mendapat salinan buku tanah yang dijilid menjadi satu kesatuan dengan surat ukur. Tujuan dilakukannya Pasca Sertipikasi Tanah Petani adalah untuk mengetahui pemanfaatan sertipikat tanah petani dalam kaitannya dengan usaha pertanian ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Program Sertipikasi Tanah Petani pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian yaitu pada tahapan sosialisasi, pengumpulan persyaratan administrasi, pengukuran dan penerbitan sertipikat.

2. Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Petani pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman telah mewujudkan kepastian hukum karena seluruh responden telah memperoleh sertipikat Hak Milik atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan ke-12, Djambatan, Jakarta.

Kertasapoetra, dkk., 1984, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.